



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

Sertifikat

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM
Nomor : 422/426/64 Paudni/2017

Diberikan kepada :

Nama PKBM	: Baeturahman
NPSN	: P2964709
Akta Notaris	: Amalia Ratnakomala, SH No.103 tanggal 07 April 2007
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
Nama Ketua	: H. Sarmani. S.Ag
Alamat PKBM	: Kp. Tugu III Rt. 02/06 Ds Tugu Mukti Kecamatan Cisarua

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421/426/64 - PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2017



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung Barat,
Dis. H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 196801121991031011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km. 2 Kab. Bandung Barat
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421 / 14268-61- Paudni/2017

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada satuan pendidikan tersebut di atas dapat izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM Dari Tn/Ny/Nn. H. Sarmani. S. Ag Pemilik dan Penyelenggara PKBM Baeturahman, Akta Notaris : Amalia Ratnakomala, SH No.103 tanggal 07 April 2007 serta lampiran-lampiran.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);